

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Cetakan Pertama*, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Karisidkk, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dr. Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Freddy Harri & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, 2017.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- H. Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Cetakan Pertama*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.



Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Jimly Ashiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Kompas, Jakarta, 2005.

Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Lutfil Anshori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja & Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.



Moh. Mahfud MD, *Membangaun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum Cetakan Pertama*, IBLAM, Jakarta, 2006.

Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.

Ni'matul Huda, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan VIII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.

Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hukum Menguji Materi di Indonesia*, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996.

Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Shidarta, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneletian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPers, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Cetakan Kedelapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.



Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal:

Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 1, Maret, 2013.

Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Media Hukum, Volume 9, Nomor 2, April-Juni, 2009.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1e5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-urutan-pengangkatan-notaris/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 14 / PERKUM / INI / 2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI)

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 15 / PERKUM / INI / 2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris.

Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 10 / PERKUM / INI / 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 06 / PERKUM / INI / 2017 tentang Magang.

Peraturan Perkumpulan INI Nomor 18 / PERKUM / INI / 2018 tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan INI Nomor 13 / PERKUM / INI / 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Poin.



Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018.

